



PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)

(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG PERIODE 2012-2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HARRIS
NIM. 115030401111012



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2015

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014)

Disusun oleh : Harris

NIM : 115030401111012

Fakultas : Ilmu Administrasi

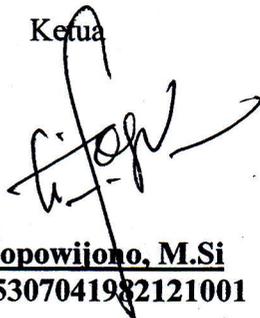
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, November 2015

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 195307041982121001

Anggota



Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP
NIP. 197704202005022001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Desember 2015
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Harris
NIM : 115030401111012
Judul : Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014)

dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua



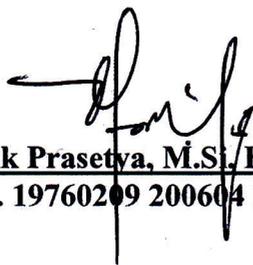
Drs. Topowjono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP
NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota



Arik Prasetya, M.Si/Ph.D
NIP. 19760209 200604 1 001

Anggota



Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA
NIP. 19770502 200212 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan pasal 70)

Malang, November 2015



Harris
NIM.115030401111012

RINGKASAN

Harris, 2015, **Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)** (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014), Drs. Topowijono, M.Si, Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP.

Sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Jika dibandingkan sebelum dan sesudah perubahan sistem pemungutan pajak maka terdapat peningkatan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang cukup besar. *Self assessment system* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak juga mempunyai risiko disalahgunakan. Oleh karena itu terdapat pemeriksaan pajak yang merupakan bagian dari *self assessment system*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* yang diwujudkan dalam jumlah SSP dan jumlah SPT dan Pemeriksaan Pajak yang diwujudkan dalam jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap Penerimaan PPh baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *explanatory research*. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yaitu data tiap bulan dari jumlah SSP, SPT, SKPKB dan SKPKBT serta penerimaan PPh selama 36 bulan. Analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara simultan membuktikan bahwa jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan SKPKBT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. (2) Secara parsial jumlah SSP, jumlah SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu agar KPP Madya Malang lebih memperluas cakupan pemeriksaan atas SSP dan SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak (WP) dan menghimbau Wajib Pajak (WP) agar memperhatikan cara menghitung ataupun mengisi SSP dan SPT sehingga diharapkan akan meminimalisir kesalahan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang belum masuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Self Assessment System*, SSP PPh, SPT PPh, Pemeriksaan Pajak, SKPKB, SKPKBT, Penerimaan PPh



SUMMARY

Harris, 2015, *The effect of Self Assessment System and Tax Audit against the Income Tax Revenue (Study on the Tax Office Madya Malang Period 2012-2014)*, Drs. Topowijono, M.Si, Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP.

Since 1983 tax collection system in Indonesia has changed from the official assessment system becomes self assessment system. When compared before and after the change in the tax collection system there is an increase in a contribution of tax revenue to state revenue. Self assessment system which gives full authority to the taxpayer has an abuse risk. Therefore there is a tax audit, which is part of the self assessment system.

This study aims to determine the effect of Self Assessment System which is represented by the amount of Tax Payment Slip of Income Tax submitted and Periodic Tax Return of Income Tax reported, Tax Audit as represented by the amount of Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter against the Income Tax Revenue either simultaneously or partially. This type of study is explanatory research. The type of data used is secondary data which is data for each month of the number of Tax Payment Slip of Income Tax submitted, Periodic Tax Return of Income Tax reported, Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter and Income Tax Revenue for 36 months. The data analysis used is descriptive statistics and inferential statistics.

Results from this study are as follows: (1) Simultaneously proved that the amount of Tax Payment Slip of Income Tax, Periodic Tax Return of Income Tax, Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter significantly influence on Income Tax Revenue. (2) Partially the amount of Tax Payment Slip of Income Tax submitted, Periodic Tax Return of Income Tax reported significantly influence on Income Tax Revenue. The amount of Underpayment Tax Assessment Letter and Added Underpayment Tax Assessment Letter not significantly effected on Income Tax Revenue. Advice given researchers are the Tax Office Madya Malang should expanding the scope of Tax audit and encourage the tax payer to be more careful counting and filling out the form, for further research is expected to develop this research by considering other variables that have not been included in this study.

Keywords: *Self Assessment System, Tax Payment Slip of Income Tax, Periodic Tax Return of Income Tax, Tax Audit, Underpayment Tax Assessment Letter, Added Underpayment Tax Assessment Letter, Income Tax Revenue*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)” Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud dengan sempurna tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Kadarisman, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Drs. Topowijono, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.



6. Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP, selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan dukungan dan saran selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Syamsuddin dan Ibu Yeti Sumiati serta kakak dan adik tercinta atas segala kasih sayang yang luar biasa, nasehat, doa, dan dukungannya yang tak henti-hentinya.
8. Kepala Kantor Kanwil DJP Jatim 3 yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi.
9. Kepala kantor serta pegawai di KPP Madya Malang khususnya Bapak Amiruddin yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada peneliti.
10. Para sahabat saya; Melisa, Ko Arid, Arief yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta semangat yang luar biasa.
11. Teman-teman perpajakan angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu terima kasih atas doa dan dukungannya kepada peneliti.

Malang, 12 November 2015

Peneliti



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pajak	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	20
3. Pengelompokan Pajak	21
4. Pemungutan Pajak	22
5. Surat Pemberitahuan (SPT)	29
6. Surat Setoran Pajak (SSP)	29
C. Pajak Penghasilan	30
1. Pengertian PPh	30
2. Subjek PPh	31
3. Objek PPh	32
4. Cara Pelunasan PPh	33
D. <i>Self Assessment System</i>	33
E. Pemeriksaan Pajak	34
1. Pengertian Pemeriksaan	34
2. Jenis Pemeriksaan	35
3. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemeriksaan	36
4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)	37
F. Hubungan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak	39



1.	Hubungan <i>Self Assessment System</i> dengan Pemeriksaan Pajak.....	39
2.	Hubungan <i>Self Assessment System</i> dengan Penerimaan Pajak.....	40
3.	Hubungan Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak.....	41
G.	Model Konsep dan Hipotesis.....	42
1.	Konsep.....	42
2.	Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....		44
A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Lokasi Penelitian.....	45
C.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	45
1.	Variabel Penelitian.....	45
2.	Definisi Operasional Variabel.....	46
D.	Jenis dan Sumber Data.....	47
1.	Jenis Data.....	47
2.	Sumber Data.....	47
E.	Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	48
F.	Analisis Data.....	49
1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	49
2.	Analisis Statistik Inferensial.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1.	Deskripsi KPP Madya Malang.....	57
2.	Wilayah Kerjan dan Wajib Pajak di KPP Madya Malang.....	57
3.	Visi dan Misi KPP Madya Malang.....	58
4.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Madya Malang.....	58
5.	Uraian Jabatan Struktur Organisasi KPP Madya Malang.....	60
B.	Penyajian Data.....	62
1.	Jumlah SSP.....	63
2.	Jumlah SPT.....	64
3.	Jumlah SKPKB dan SKPKBT.....	65
4.	Jumlah Penerimaan PPh.....	66
C.	Statistik Deskriptif.....	67
D.	Statistik Inferensial.....	69
1.	Uji Asumsi Klasik.....	69
2.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	73
3.	Pengujian Hipotesis.....	74
E.	Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....		81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Struktur Penerimaan Negara tahun 2010-2014	1
2.	Kontribusi Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak	6
3.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	13
4.	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	16
5.	Jumlah SSP	63
6.	Jumlah SPT	64
7.	Jumlah SKPKB dan SKPKBT	65
8.	Jumlah Penerimaan PPh	66
9.	Statistik Deskriptif	68
10.	Uji Normalitas	69
11.	Uji Multikolinearitas	71
12.	Uji Autokorelasi	72
13.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	73
14.	Hasil Uji R ²	75
15.	Hasil Uji-F	76
16.	Hasil Uji-T	77



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Komposisi Penerimaan Negara Periode Tahun 1980an dan 2000an	4
2.	Model Konsep	42
3.	Model Hipotesis	43
4.	Daerah Kritis Uji Durbin-Watson	53
5.	Bagan Struktur Organisasi	60
6.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	70



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah SSP, SPT, SKPKB dan SKPKBT, Penerimaan PPh.....	86
2.	Statistik Deskriptif.....	87
3.	Uji Asumsi Klasik.....	88
4.	Regresi Linier Berganda.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang optimal. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggara negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional akan tercapai apabila didasari dengan pondasi ekonomi yang baik, yakni jika sumber penerimaan negara yang ada dapat membiayai jalannya roda pemerintahan dan telah digali secara optimal.

Jika dilihat dari struktur penerimaan negara saat ini, maka komponen terbesar penyusun sumber penerimaan negara adalah dari sektor pajak. Seperti yang dapat dilihat pada data dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Struktur Penerimaan Negara tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Negara	1.210,6	1.358,2	1.507,7	1.662,5
Penerimaan Perpajakan	873,9 (72,1%)	1.016,2 (74,8%)	1.178,9 (78,1%)	1.310,2 (78,8%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	331,5 (27,3%)	341,1 (25,1%)	324,3 (21,5%)	350,9 (21,0%)
Penerimaan Hibah	5,3 (0,6%)	0,8 (0,1%)	4,5 (0,4%)	1,4 (0,2%)

Sumber : Nota Keuangan Negara, 2014



Data penerimaan negara pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2014 pajak selalu berkontribusi lebih dari 70% terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pajak sebagai sumber penerimaan negara yang memegang peranan sangat penting. Menurut Mardiasmo (2009:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih baik lagi. Salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Reformasi pajak adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat (Rahayu, 2010:97). Indonesia pertama kali melakukan reformasi pajak pada tahun 1983.

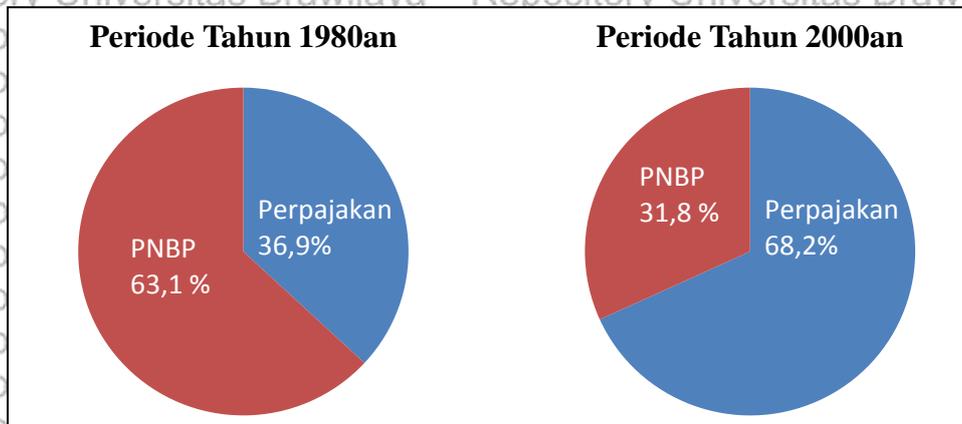
Salah satu perubahan administrasi perpajakan pada reformasi pajak yang pertama yaitu dari segi sistem pemungutan pajak. Menurut Wahyuni (2013:6) sistem pemungutan pajak merupakan salah satu hal yang utama yang mempengaruhi Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Tjahjono dan Husain (2005:27) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan pajak diantaranya yaitu struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, moral penduduk dan sistem/teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sejak tahun 1984 sistem pemungutan



pajak yang sebelumnya memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang atau disebut dengan *official assessment system*, mengalami perubahan menjadi *self assessment system*.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) diberi wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (Rahayu, 2010:101), dari pengertian tersebut maka *self assessment system* dapat digambarkan dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini karena menurut Mardiasmo (2009:29) SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pajak yang telah dibayarkan, sementara SSP menurut Resmi (2012:34) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran yang lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Jika dilihat dari komposisi penerimaan dalam negeri sebelum dan sesudah dilakukannya reformasi pajak maka terdapat perbedaan yang cukup besar. Seperti data yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Komposisi Penerimaan Negara Periode Tahun 1980an dan 2000an

Sumber : Data diolah peneliti dari Pradana (2013)

Gambar 1 menunjukkan bahwa komposisi dari penerimaan negara sebelum dan sesudah dilakukannya reformasi mengalami perubahan. Jika pada periode tahun 1980an Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai porsi lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pajak, yaitu sebesar 63,1%. Di sisi lain, pada periode tahun 2000an kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak meningkat drastis menjadi 68,2%. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pajak yang salah satunya adalah perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak.

Penerapan *self assessment system* juga bukannya tanpa ada kendala. Pemberian wewenang penuh kepada WP juga mempunyai risiko. Risiko ini dapat terjadi kepada WP yang kurang memiliki sikap patuh dan jujur. Penerapan *self assessment system* dapat menjadi celah untuk WP melakukan kecurangan (Rahayu, 2010:102). Kecurangan yang dilakukan WP dapat berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak yang dikarenakan pembayaran pajak tertunggak oleh



WP yang tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu disamping memberikan kepercayaan penuh kepada WP, di dalam administrasi perpajakan juga dikenal adanya pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Gunadi, 2001:51). Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan (*built-in*) dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Suandy (2008:105) pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengawasan terhadap sistem *self assessment*. Gunadi (2001:51) mengungkapkan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Tanpa pengawasan, WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari pajak.

Menurut Prihastuti (2011: 6) tujuan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan WP dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran
2. SPT tahunan pajak menunjukkan rugi
3. SPT tidak disampaikan pada waktu yang ditentukan
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi oleh Dirjen Pajak
5. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan produk yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak. SKPKB dan SKPKBT mencerminkan bahwa jumlah pajak yang disetorkan oleh WP kurang dari yang semestinya dibayar, sehingga



penerimaan pajak tidak sesuai dengan semestinya. Menurut Harmawan (2011:38)

SKPKB dan SKPKBT adalah produk pemeriksaan yang paling potensial meningkatkan jumlah penerimaan, hal ini dikarenakan SKPKB dan SKPKBT merupakan sarana untuk menagih pajak yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan ketetapan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *self assesment system*. PPh merupakan pajak yang mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dari sektor pajak, seperti yang dapat dilihat di tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Kontribusi Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Kontribusi Pajak Penghasilan	Kontribusi PPN dan PPhBm	Kontribusi cukai	Kontribusi pajak lainnya
2011	49,33%	31,78%	8,82%	10,07%
2012	50,54%	34,44%	9,69%	5,33%
2013	49,03%	35,71%	10,88%	4,38%
2014	43,01%	36,02%	8,92%	11,78%

Sumber : kemenkeu.go.id, 2015

Jika merujuk pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak dari sektor PPh merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kontribusi pajak lainnya terhadap total penerimaan pajak dengan nilai rata-rata kontribusi dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mencapai 47,97% pada tahun 2013, sementara PPN dan PPhBM hanya menyumbang 34,5%, selanjutnya cukai sebesar 9,57% dan sisanya sebesar 7,96% merupakan kontribusi dari pajak lainnya, oleh karena itu sektor PPh merupakan sektor pajak utama yang mempunyai peranan yang sangat penting.



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang merupakan KPP yang menangani dan melayani WP besar terkait dengan masalah perpajakan. KPP Madya Malang adalah kantor khusus yang menangani WP terbesar di Jawa Timur bagian timur. Wilayah administrasinya mencakup Pare, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Situbondo.

Frekuensi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Madya cukup sering digelar (hasil wawancara dengan Ibu Ayu, bagian humas Kanwil DJP III Jatim, tanggal 20 Mei 2015 pukul 10.20 WIB). Seringnya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Madya Malang menandakan bahwa sistem pemungutan pajak yang dilakukan di KPP Madya Malang yakni *self assessment system* belum berjalan dengan baik, karena pemeriksaan dilakukan apabila ada kesalahan atau ada indikasi ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP, padahal seperti yang telah disebutkan di awal bahwa sistem pemungutan pajak merupakan pilar terpenting dalam penerimaan pajak.

Berdasarkan berbagai latar belakang yang telah diungkapkan peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak dari sektor PPh dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)”** Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh yang signifikan secara simultan antara jumlah SSP, jumlah SPT dan jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap jumlah penerimaan PPh di KPP Madya Malang?
2. Adakah pengaruh yang signifikan secara parsial antara jumlah SSP, jumlah SPT dan jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap jumlah penerimaan di KPP Madya Malang?

C. Tujuan Penelitian

Selain rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat tujuan dari penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui adakah pengaruh yang signifikan secara simultan antara jumlah SSP, jumlah SPT dan jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap jumlah penerimaan PPh di KPP Madya Malang.
2. Mengetahui adakah pengaruh yang signifikan secara parsial antara jumlah SSP, jumlah SPT dan jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap jumlah penerimaan PPh di KPP Madya Malang.



D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi akademis

a) Bagi Peneliti

Kontribusi dari penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dalam hal pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan administrasi perpajakan terkait dengan pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh.

2. Kontribusi praktis

Adapun kontribusi praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan informasi dan evaluasi bagi KPP Madya Malang terhadap *self assessment system* dan pemeriksaan atas PPh, sehingga diharapkan KPP Madya melakukan perbaikan yang diperlukan agar penerimaan PPh di KPP Madya Malang dapat lebih baik lagi.



E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjabaran teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, antara lain tinjauan mengenai penelitian terdahulu, *self assessment system*, pajak, PPh dan pemeriksaan pajak.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh melalui tempat penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sari (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Barat”, menggunakan variabel bebas jumlah NPWP (X_1) dan jumlah SSP (X_2) serta variabel terikat penerimaan PPh (Y). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh, sedangkan SSP berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPh. Secara simultan NPWP dan SSP berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan PPh.

Sudirman (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung-Karees”, menggunakan variabel bebas jumlah NPWP (X_1) dan jumlah SPT PPh (X_2) serta variabel terikat penerimaan PPh orang pribadi (Y). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah NPWP dan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Secara simultan NPWP dan SSP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh.

Fahri Reza Harmawan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak”, menggunakan variabel



bebas jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 yang disampaikan tepat waktu (X_1) dan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan (X_2) serta variabel terikat yaitu penerimaan PPh pasal 25 (Y). Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kepatuhan WP dan pemeriksaan pajak berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Demak.

Haq, Siraja dan Ashari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara” menggunakan variabel bebas kepatuhan wajib pajak (X_1) dan pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_2) serta penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi (Y). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh, dan jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh, secara simultan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.

Sudadyo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Faktor *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Surakarta)”, menggunakan variabel bebas jumlah WP (X_1) dan jumlah SPT Pasal 25 (X_2) serta penerimaan PPh (Y). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa secara parsial jumlah WP berpengaruh terhadap penerimaan PPh, dan jumlah SSP berpengaruh terhadap penerimaan PPh.

Rahmawati, Santoso dan Hamidi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta”, menggunakan variabel bebas pemeriksaan pajak yang dihitung dari jumlah SKP (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (X_2) serta penerimaan PPh badan (Y). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh. Secara simultan pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan.

Berikut ini adalah ringkasan dari lima penelitian terdahulu di atas yang disajikan ke dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Sari (2009)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Barat	variabel bebas jumlah NPWP (X_1) dan jumlah SSP (X_2) serta variabel terikat penerimaan PPh (Y)	analisis regresi berganda	secara parsial jumlah NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh, sedangkan SSP berpengaruh signifikan terhadap



Lanjutan Tabel 3

Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
				penerimaan PPh. Secara simultan NPWP dan SSP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh.
Sudirman (2010)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung-Karees	variabel bebas jumlah NPWP (X_1) dan jumlah SPT PPh (X_2) serta variabel terikat penerimaan PPh orang pribadi (Y)	analisis regresi linear berganda	secara parsial jumlah NPWP dan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Secara simultan NPWP dan SSP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh.
Harmawan (2011)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak	variabel bebas jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 yang disampaikan tepat waktu (X_1) dan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan (X_2) serta	analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kepatuhan WP dan pemeriksaan pajak berpengaruh baik secara simultan maupun parsial



Lanjutan Tabel 3

Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		variabel terikat yaitu penerimaan PPh pasal 25 (Y)		terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Demak
Haq, Siraja dan Ashari (2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	variabel bebas kepatuhan wajib pajak (X_1) dan pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_2) serta penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi (Y)	analisis regresi berganda	secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh, dan jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh, secara simultan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.
Sudadyo (2013)	Pengaruh Faktor <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Surakarta	variabel bebas jumlah WP (X_1) dan jumlah SSP (X_2) serta penerimaan PPh (Y)	analisis regresi berganda	secara parsial jumlah WP dan SSP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh





Lanjutan Tabel 3

Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Rahmawati, Santoso dan Hamidi (2014)	Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta	variabel bebas pemeriksaan pajak yang dihitung dari jumlah SKP (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (X_2) serta penerimaan PPh badan (Y)	analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh. Secara simultan pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan

Sumber : Data diolah peneliti (2015)

Selanjutnya pada tabel 4 akan disajikan persamaan dan perbedaan penelitian, sebagai berikut:

Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
Sari (2009)	Menggunakan jumlah SSP sebagai <i>self assessment system</i> dan variabel terikat (enerimaan PPh), analisis yang digunakan regresi linier berganda, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder	Lokasi penelitian yang dipilih berbeda, Sari menggunakan variabel jumlah NPWP namun tidak menggunakan variabel pemeriksaan pajak



Lanjutan Tabel 4

Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
Sudirman (2010)	Menggunakan variabel jumlah SPT sebagai bagian dari <i>self assessment system</i> , menggunakan variabel terikat penerimaan PPh, teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder	Lokasi penelitian yang dipilih berbeda, Sudirman menggunakan variabel jumlah NPWP namun tidak menggunakan variabel pemeriksaan pajak
Harmawan (2011)	Variabel bebas (pemeriksaan pajak) dan variabel terikat (Penerimaan PPh) sama, teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder	Lokasi penelitian yang dipilih berbeda, Harmawan menggunakan variabel kepatuhan pajak, tetapi tidak menggunakan variabel <i>self assessment system</i>
Haq, Siraja dan Ashari (2013)	Menggunakan jumlah SKPKB dan SKPKBT sebagai pemeriksaan pajak, variabel terikat (penerimaan PPh) sama, teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder	Lokasi penelitian yang dipilih berbeda, Haq, Siraja dan Ashari menggunakan variabel kepatuhan pajak
Sudadyo (2013)	Menggunakan SSP sebagai <i>self assessment system</i> dan variabel terikat (Penerimaan PPh) yang digunakan sama, teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder	Lokasi penelitian yang dipilih berbeda, Sudadyo menggunakan variabel jumlah WP namun tidak menggunakan variabel pemeriksaan pajak
Rahmawati, Santoso dan Hamidi (2014)	Menggunakan SKP sebagai pemeriksaan pajak, variabel terikat (Penerimaan PPh) yang digunakan sama, teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder	Lokasi penelitian yang dipilih berbeda, Rahmawati, Santoso dan Hamidi menggunakan variabel kepatuhan pajak tetapi tidak menggunakan <i>self assessment system</i>

Sumber : Data diolah peneliti (2015)



B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli pajak, diantaranya yaitu:

- a) Menurut Soemitro dalam Halim (2014:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b) Menurut Seligman dalam Riyanto (2014:15) pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari perseorangan kepada pemerintah untuk membiayai biaya yang dikeluarkan untuk seluruh kepentingan umum, tanpa merujuk pada manfaat khusus yang diberikan kepada perseorangan.
- c) Menurut Djajadiningrat dalam Mardiasmo (2009:3) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, dapat dipaksakan menurut peraturan dan tidak ada jasa timbal balik, untuk kesejahteraan umum.
- d) Menurut Adriani dalam Zain (2008:10) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dan



guna untuk membiayai pengeluaran umum negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selain pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli pajak di atas, pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a) Pajak dapat dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- c) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan kontraprestasi dari negara.
- d) Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.



e) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

f) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

a) Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* dari pajak yaitu untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran pembangunan (Mardiasmo, 2009:4). Fungsi *budgeter* merupakan fungsi utama pajak. Berdasarkan fungsi ini, pajak memiliki peran sebagai sumber pemasukkan dan alat untuk membiayai pengeluaran umum negara.

b) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Fungsi *regularend* dalam pajak yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009:4). Selain itu menurut Riyanto (2014:17) fungsi pajak sebagai fungsi mengatur memiliki arti suatu fungsi yang memposisikan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan untuk:

1. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.



2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Jadi, di samping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur, diantaranya yaitu:

1. Penerapan tarif pajak progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga sebagai alat dalam redistribusi pendapatan).
2. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.

3. Pengelompokkan Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Berikut ini merupakan pengelompokkan pajak yang telah digolongkan ke dalam beberapa kriteria.

- a) Pajak berdasarkan golongannya, menurut Rahayu (2010:51) pajak menurut golongannya dapat digolongkan sebagai berikut:

- i. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b) Pajak menurut sifatnya, menurut Halim (2014:5) menyatakan bahwa menurut sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperlihatkan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c) Pajak menurut lembaga pemungutnya, jika dilihat dari lembaga yang memungut maka dapat dibagi menjadi dua (Halim, 2014:5) yaitu:

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

b) Pajak kabupaten/kota, contohnya pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

4. Pemungutan Pajak

a) Cara pemungutan pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut ini:

1. Stelsel nyata

Stelsel nyata yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui

(Mardiasmo, 2009:7). Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan dari stelsel ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang (Halim, 2014:6). Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak mencerminkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis. Sistem ini dalam PPh diterapkan dalam pembayaran PPh Pasal 25 (Rahayu dan Suhayati, 2010:6).

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan (Halim, 2014:6). Pada awal tahun dihitung besarnya pajak menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung sesuai dengan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar daripada pajak menurut stelsel anggapan maka WP harus menambah, sebaliknya jika jumlah pajak



menurut stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan, maka kelebihanannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada periode berikutnya.

b) Asas pengenaan pajak

Pengenaan pajak tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan asas pengenaan. Menurut Resmi (2012:9) berdasarkan asas pengenaannya maka asas pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)
mengatakan bahwa pada asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
2. Asas sumber
Berdasarkan asas sumber, suatu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan
Menurut asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

c) Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dikenal tiga sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assessment System

Menurut Mardiasmo (2009:7) *official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib





pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri

Official Assessment System adalah:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) WP bersifat pasif
- c) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak

2. *Self Assessment System*

Self assessment system menurut Diana dan Setiawati (2009:1) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009:8).

d) Syarat pemungutan pajak

Dalam rangka memenuhi rasa keadilan dalam pemungutan pajak, maka dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada syarat-syarat berikut ini:



1. *Equality*

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama (Tjahjono, 2005:19). Mungkin suatu ketentuan hukum dalam undang-undang secara umum sudah dirasa adil karena sudah memenuhi syarat yang sama, diperlakukan secara sama (*equality*) namun ada kalanya apa yang dikatakan adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.

Menurut Musgrave dalam Riyanto (2014:19) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a) *Benefit principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

b) *Ability principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

2. *Certainty* atau kepastian hukum

Dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum yang jelas dan adanya jaminan hukum.

3. *Convenience of payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat WP mempunyai uang. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada saat yang tidak memberatkan WP untuk membayar.



4. *Economics of collection*

Dalam pembuatan undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja.

Di samping empat syarat yang telah disebutkan di atas, menurut Tjahjono (2005:20) ada beberapa syarat lainnya dalam memungut pajak, diantaranya yaitu:

1. Syarat yuridis

Yakni undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum. Dalam penyusunan undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang.

2. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung.

3. Syarat finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Oleh karenanya pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin.

4. Syarat sosiologis

Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu.

5. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

e) **Teori pembenaran pemungutan pajak**

Pemungutan pajak dibenarkan secara hukum karena adanya hubungan kasualitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan

pelayanan. Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak menurut Halim (2014:4) adalah:

1. Teori asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori gaya pikul
Pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur gaya pikul seseorang dapat digunakan barometer jumlah penghasilan, kekayaan, belanja atau pengeluaran dan jumlah keluarga.
4. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)
Rakyat membayar pajak kepada negara menunjukkan rasa baktinya kepada negara.
5. Teori asas gaya beli
Menurut teori ini penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Teori ini menitikberatkan pada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur

f) Hambatan pemungutan pajak

Dalam proses pemungutan pajak, terdapat beberapa hambatan yang mungkin terjadi, diantaranya yaitu:

1. Perlawanan pasif
Penyebab masyarakat melakukan perlawanan pasif atau enggan membayar menurut Mardiasmo (2009:9) antara lain:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik





2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif termasuk upaya dan perbuatan secara langsung ditujukan pada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Menurut Rahayu (2014:148) bentuk dari perlawanan aktif diantaranya yaitu:

a) *Tax avoidance*, yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara yang legal (masih dibenarkan) dengan tidak melanggar undang-undang.

b) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban dengan cara yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim, 2014:25). Menurut Mardiasmo (2009:29) fungsi dari SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SPT merupakan sarana yang dipakai oleh WP untuk melaporkan pajak terutang yang telah disetorkan.

6. Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran yang lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan (Resmi,



2012:34). SSP berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai sarana bukti atau laporan pembayaran pajak. Terdapat dua jenis SSP, yaitu:

a) SSP standar : surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

b) SSP khusus: bukti pembayaran atau penyeteroran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

C. Pajak Penghasilan (PPh)

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Diana dan Setiawati, 2009:163). Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Suandy (2011: 75) yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

“pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) digolongkan ke dalam pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.”

2. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Resmi (2012:74) subjek PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek PPh menurut Halim (2014:47) yaitu:

- a) Subjek pajak pribadi, yaitu meliputi WP yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
 - b) Subjek pajak warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan, dalam hal ini WP yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum dibagi.
 - c) Subjek pajak badan, yaitu badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya.
 - d) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha yang berupa:
 - 1. tempat kedudukan manajemen
 - 2. cabang perusahaan
 - 3. kantor perwakilan gedung kantor
 - 4. pabrik
 - 5. bengkel
 - 6. pertambangan dan penggalian sumber alam
 - 7. perikanan, peternakan, pertanian, atau perkebunan
 - 8. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
 - 9. pemberian jasa dalam bentuk apapun
 - 10. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
 - 11. agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia yang menerima premi asuransi di Indonesia.
- Sedangkan yang menjadi pengecualian subjek pajak PPh yaitu:

- 1. badan perwakilan negara asing
- 2. pejabat perwakilan organisasi internasional yang di atur menteri keuangan
- 3. organisasi internasional yang ditetapkan menteri keuangan



4. pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, pejabat negara asing dan orang yang diperbantukan dengan syarat tidak menerima penghasilan lain.

3. Objek PPh

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2012:78). Jenis penghasilan yang termasuk objek PPh menurut (Resmi, 2012:79) yaitu:

- a) gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh
- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c) laba usaha
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f) bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h) royalty atau imbalan atas penggunaan hak
- i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n) premi asuransi
- o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- s) surplus Bank Indonesia



4. Cara Pelunasan PPh

a) Pelunasan tahun berjalan

Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi:

1. Pembayaran sendiri oleh WP (PPh pasal 25) untuk setiap masa pajak.
2. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak

b) Pelunasan pajak sesudah akhir tahun, meliputi:

1. Pembayaran pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah PPh terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan
2. Pembayaran pajak yang kurang disetor berdasarkan SKP atau STP yang ditetapkan oleh DJP.

D. *Self Assessment System*

Menurut Halim (2014: 7) yang dimaksud dengan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Selain itu, menurut

Tjahjono (2005:23) menyebutkan bahwa *self assessment system* adalah wewenang menghitung pajak diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif sementara fiskus hanya mengawasi. Ciri-ciri dari *self assessment system* menurut

Mardiasmo (2009:7) yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Self assessment system didasarkan pada asumsi bahwa WP merupakan orang-orang yang bersikap jujur dan karena itu diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya. Keberhasilan *self assessment system* dapat dijalankan dengan baik bila prasyarat yang ada dapat dipenuhi dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak ini. Menurut Kesit dalam Harmawan (2011: 20) pemungutan pajak menuntut WP untuk lebih mandiri dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. Hal ini merupakan bentuk dari azas pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah yaitu azas pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat.

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi bagi badan usaha sebagai WP. Konsekuensinya adalah badan usaha diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya dilakukan sendiri oleh badan usaha tersebut.

E. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan

Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (Rahayu, 2010:245). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam rangka *self*





assessment system merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan.

Pemeriksaan menurut Mardiasmo (2009:5) adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kepatuhan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut Suandy (2011:101) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan pajak juga merupakan sarana pembinaan dan pengawasan terhadap WP.

Penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan selama ini diharapkan dapat membuat WP menghindari praktek-praktek kecurangan pajak. Seperti yang diungkapkan Mardiasmo (2009:9) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan negara tidak optimal yaitu dikarenakan 1) perkembangan intelektual dan moral masyarakat 2) sistem perpajakan yang sulit dipahami 3) sistem kontrol (pemeriksaan dan pengawasan) yang kurang baik. Oleh karena itu, dengan dilakukan pemeriksaan diharapkan penerimaan dari sektor pajak akan optimal.

2. Jenis Pemeriksaan

Dilihat dari tempat pelaksanaan pemeriksaan, maka pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:



a) Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik) ataupun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal (Rahayu, 2010:262).

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang sebenarnya karena pemeriksa dengan leluasa dapat menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan.

b) Pemeriksaan kantor

Pemeriksaan kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP (Halim, 2014:36). Pemeriksaan kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

3. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemeriksaan

a) Ruang lingkup pemeriksaan bisa juga disebut *audit scope*. Ruang

lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan.

Penentuan ruang lingkup pemeriksaan akan mempengaruhi teknik

pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan

sasaran atau jenis pajak yang diperiksa. Menurut Priantara (2000:28)

terdapat dua lingkup pemeriksaan pajak, yaitu:

1. Pemeriksaan lengkap, yang dilakukan ditempat wajib pajak

(lapangan) dan meliputi seluruh jenis pajak.

2. Pemeriksaan sederhana, pemeriksaan dengan melakukan teknik-

teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

b) Tujuan pemeriksaan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. untuk menguji kepatuhan, yaitu pemeriksaan yang akan berujung pada penetapan pajak terutang. Hasilnya berupa: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Tagihan Pajak (STP).

2. Sementara untuk tujuan lain menurut Halim (2014:36) yaitu:

- a) Pemberian NPWP secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi.
- b) Penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi.
- c) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi.
- d) wajib pajak mengajukan keberatan.
- e) pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f) pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g) penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- i) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Menurut Mardiasmo (2009: 39) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat

Tagihan Pajak (STP). SKP merupakan produk yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Menurut Suandy (2011:131) menyatakan bahwa penerbitan SKP hanya sebatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP.

a) SKPKB

1. Pengertian SKPKB

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar (Resmi, 2012:40).

2. Penerbitan SKPKB

SKPKB dapat diterbitkan apabila:

- a) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- c) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%
- d) kewajiban menyelenggarakan pembukuan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang
- e) kepada WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.





b) SKPKBT

1. Pengertian SKPKBT

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah kurang pajak yang telah ditetapkan (Resmi, 2012:41).

2. Penerbitan SKPKBT

Penerbitan SKPKBT dilakukan dalam hal ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKPKB dan SKPKBT mencerminkan kurangnya jumlah pajak yang dari yang semestinya dibayar WP, sehingga penerimaan pajak juga kurang dari yang semestinya diperoleh.

F. Hubungan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan

PPh

1. Hubungan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak

Self assessment system merupakan sistem pemungutan yang diterapkan pada PPh. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Sari, 2009). Penerapan proses menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dapat dilihat dari jumlah SSP dan SPT, hal ini dikarenakan SSP dan SPT merupakan sarana dalam proses tersebut. Pemberian wewenang secara penuh kepada WP ini memiliki risiko untuk



terjadinya ketidaksesuaian jumlah pajak atau kesalahan dalam pengadministrasian perpajakan. Menurut Priantara (2000:23) mengemukakan bahwa pengawasan dalam hal ini pemeriksaan pajak adalah bagian dari *self assessment system*, hal ini dimaksudkan agar *self assessment system* berjalan efektif dan adanya keterbukaan. Oleh karena itu, dalam perpajakan dikenal adanya suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan dan kejujuran WP dalam menjalankan *self assessment system*.

2. Hubungan *Self Assesment System* dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

Sistem pemungutan pajak adalah salah satu bagian utama dalam perpajakan. Sistem pemungutan merupakan gerbang utama dari penerimaan pajak, karena proses pemungutan pajak berhubungan langsung dengan penerimaan seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2013:6) bahwa sistem pemungutan pajak merupakan salah satu hal yang utama yang mempengaruhi Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak. Lebih lanjut Tjahjono dan Husain (2005:27) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan pajak diantaranya yaitu struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, moral penduduk dan sistem/teknik pemungutan pajak itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh.



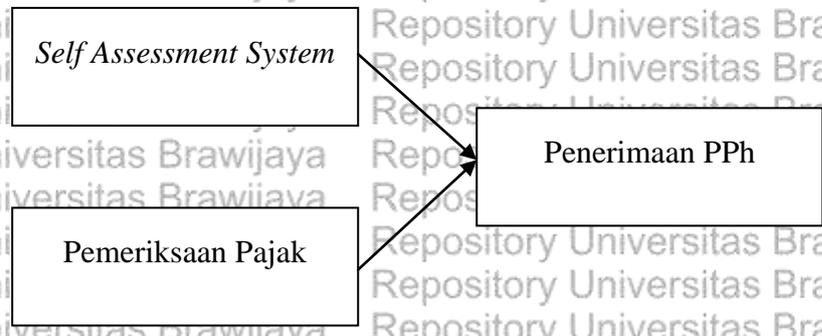
3. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Harmawan, 2011:28). Tujuan dari pemeriksaan adalah sebagai upaya untuk membuat WP membayar pajak sesuai dengan jumlah semestinya. Seperti yang diungkapkan oleh Gunadi (2001:51) yang menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. SKPKB dan SKPKBT merupakan produk yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak. Penerbitan SKPKB dan SKPKBT mencerminkan penerimaan pajak yang belum optimal, karena masih terdapatnya pajak yang kurang dibayar. Menurut Harmawan (2011:38) SKPKB dan SKPKBT adalah produk pemeriksaan yang paling potensial meningkatkan jumlah penerimaan, hal ini dikarenakan SKPKB dan SKPKBT merupakan sarana untuk menagih pajak yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan ketetapan. Pemeriksaan pajak diharapkan akan membuat penerimaan pajak dapat terkumpul secara optimal atau sebagaimana mestinya.

G. Model Konsep dan Hipotesis

1. Konsep

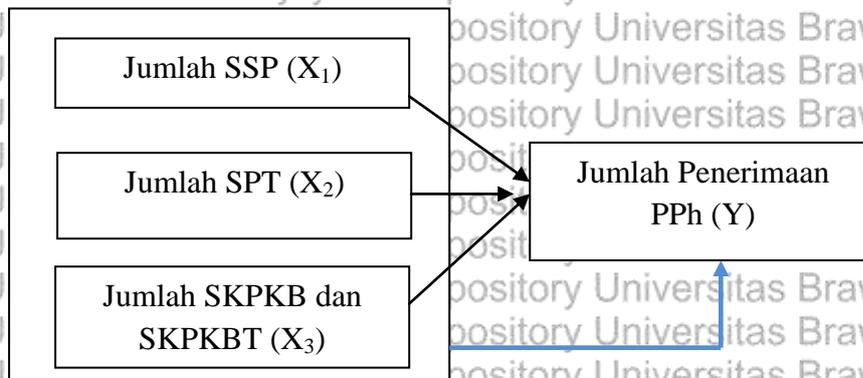
Dari kajian secara teoritis mengenai pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh, maka dapat dirumuskan model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis. Model konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Model Konsep
Sumber : Data diolah peneliti (2015)

2. Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam Harmawan (2011: 41) konsep pokok yang diukur dengan variabel yang diberi definisi khusus oleh peneliti agar peneliti dapat menguji hipotesis penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002: 64). Variabel bebas yaitu *self assessment system* dalam penelitian ini dilihat dari jumlah SSP dan SPT, sedangkan pemeriksaan pajak dilihat dari jumlah SKPKB dan SKPKBT sementara penerimaan PPh sebagai variabel terikat dilihat dari jumlah penerimaan PPh. Oleh karena itu, penelitian ini dapat disusun sebuah model hipotesis seperti gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Model Hipotesis

Sumber: *Data diolah peneliti (2015)*

Keterangan:

→ Pengaruh parsial

→ Pengaruh simultan

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Diduga terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap jumlah penerimaan PPh.

H2 : Diduga terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan SKPKBT terhadap jumlah penerimaan PPh.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Salah satu prosedur yang wajib terdapat pada suatu penelitian yaitu adanya suatu metode penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai suatu cara bagi peneliti untuk mendapatkan dan menganalisis suatu data yang diperlukan untuk sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif yang akan memberikan penjelasan mengenai hubungan sebab-akibat antara variabel dependen dan variabel independen.

Menurut Widi (2010:48) penelitian penjelasan adalah penelitian yang lebih jauh mencoba untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana dua aspek/faktor atau lebih mempunyai hubungan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, penelitian ini tidak hanya sekedar untuk menemukan hubungan dua atau lebih aspek tersebut, namun juga menjelaskannya. Alasan utama peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena peneliti ingin menguji hipotesis yang telah diajukan. Sehingga diharapkan dengan hipotesis tersebut dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas yaitu *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh sebagai variabel terikat.

Berdasarkan jenis data yang diteliti maka penelitian ini merupakan jenis penelitian arsip. Penelitian arsip merupakan penelitian terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data (Laurensia, 2011). Dokumen arsip yang diteliti



berdasarkan sumbernya dapat berasal dari internal (arsip dan catatan orisinal yang diperoleh dari suatu organisasi) atau berasal dari data eksternal, yaitu publikasi data yang diperoleh melalui orang lain.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Dari lokasi penelitian inilah peneliti dapat menggali data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Jawa Timur. Mengingat judul penelitian ini sangat berkaitan erat dengan sistem perpajakan, maka peneliti memilih KPP Madya Malang. KPP Madya Malang dipilih karena frekuensi pemeriksaan yang dilakukan cukup sering digelar, hal ini mengindikasikan bahwa *self assessment system* yang dijalankan oleh WP di KPP Madya Malang belum berjalan baik.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Menurut Widi (2010: 159) variabel adalah konsep yang mempunyai nilai dan dapat diukur. Nilai suatu variabel dapat dinyatakan dengan angka atau kata-kata. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah dampak atau hasil yang diperoleh akibat adanya perubahan dari variabel bebas.



Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah SSP (X_1) dan jumlah SPT (X_2) yang merupakan perwujudan dari *self assessment system* dan jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) sebagai perwujudan dari pemeriksaan pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini hanya sebagai konsep.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan PPh (Y) yang merupakan perwujudan dari penerimaan PPh. Dari semua data variabel yang diperoleh dari KPP Madya Kota Malang tersebut seluruhnya diambil dari data tiap bulan selama tiga tahun (36 bulan) dari tahun 2012-2014.

2. Definisi Operasional Variabel

a) Jumlah SSP (X_1)

SSP merupakan sarana atau surat yang digunakan oleh WP dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke tempat yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Data dari variabel jumlah SSP yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SSP tiap bulan dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

b) Jumlah SPT (X_2)

SPT adalah surat yang digunakan sebagai sarana bagi WP dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang yang telah disetorkan. Data dari variabel jumlah SPT yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPT tiap bulan dari tahun 2012 sampai tahun 2014.



c) Jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3)

SKPKB dan SKPKBT adalah produk yang dihasilkan dari proses pemeriksaan yang mempunyai potensi meningkatkan penerimaan pajak karena berfungsi sebagai sarana menagih pajak yang kurang dibayar.

Data dari variabel jumlah SKPKB dan SKPKBT yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SKPKB dan SKPKBT tiap bulan dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

d) Jumlah Penerimaan PPh (Y)

Penerimaan PPh adalah jumlah penerimaan PPh diterima tiap bulannya.

Data dari variabel jumlah penerimaan PPh yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan PPh tiap bulan dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah sesuatu yang dimiliki oleh anggota dari populasi yang dapat diukur (Kountur, 2005:6). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif *time series*. Menurut Noer (2004: 22) data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa laporan seksi pelayanan dan seksi pemeriksaan tiap bulannya.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan dan Misbahuddin, 2013:21). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, dimana data yang diperoleh nantinya akan diolah dan dianalisis sehingga akan menghasilkan suatu interpretasi yang jelas sebagai hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengutip atau menyalin dokumen berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang relevan yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini (Arikunto, 2006:231). Dokumen-dokumen yang dikumpulkan peneliti berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan instansi yang berkaitan dengan penelitian berupa jumlah SSP, jumlah SPT, dan jumlah SKPKB dan SKPKBT, serta jumlah penerimaan PPh tiap bulannya.

Instrumen Penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2002:134). Instrumen dalam penelitian ini adalah alat tulis, dan media penyimpanan data (*flashdisk*).





F. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu proses analisis dimana peneliti mengumpulkan dan meringkas data dengan tujuan menggambarkan berbagai karakteristik penting pada data yang telah terorganisasi (Harmawan, 2011:46). Menurut Santoso dalam Harmawan (2011:46) mengatakan bahwa penggunaan metode statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi suatu data, seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dan sebagainya.

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis inferensial adalah analisis pengembangan dari analisis deskriptif yang merupakan bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut (Harmawan, 2011:46). Menurut Azwar (2013:132) pengolahan data pada tingkat inferensial dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan dengan pengujian hipotesis. Adapun langkah analisis inferensial dalam penelitian ini melibatkan pengujian data dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 sebagai berikut:

a) Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Ghozali dalam Harmawan (2011: 46) tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak biasa yang terbaik. Oleh karena itu, model regresi



harus memenuhi asumsi dasar klasik yaitu memenuhi asumsi kenormalan residual serta tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan empat cara, yaitu:

1. Normalitas

Uji normalitas adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik nonparametrik (Misbahuddin, 2013:278). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:110). Uji normalitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan yaitu jika signifikan $> 0,05$ maka data tersebut normal (Ghozali, 2005:165).

2. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali, 2005:105). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2005:105) terdapat beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melalui scatter plot dengan dasar pengambilan keputusan:

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Multikolinearitas

Menurut Algifari (2009:84) menyebutkan bahwa

multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1) antarvariabel independen yang terdapat dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar

variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya

hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2005:91). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model

regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah multikolinearitas atau tidak adanya korelasi antara variabel independennya (Harmawan, 2011: 47).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF (*Value Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* = 1, maka tidak ada

korelasi antara variabel independen, atau jika VIF lebih dari 10 dikatakan terjadi kolinieritas yang tinggi (Ghozali, 2005:92).

Menurut Priyatno dalam Harmawan (2011: 47) menyebutkan bahwa

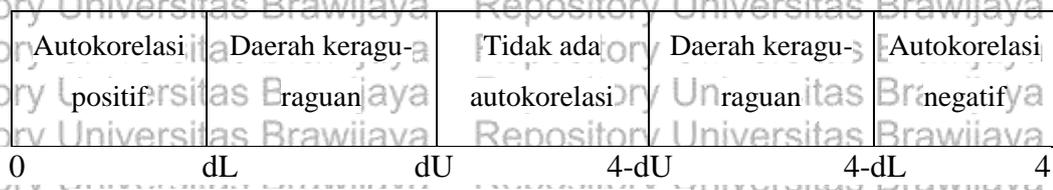




untuk mendeteksi apakah terjadi masalah multikolinieritas dapat melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF, semakin kecil nilai dari *tolerance* dan semakin besar VIF maka semakin mendekati masalah multikolinieritas. Dalam sekian banyak penelitian menyebutkan bahwa jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

4. Autokorelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana terdapat korelasi atau hubungan antar pengamatan (observasi), baik itu dalam bentuk observasi deret waktu (*time series*) atau observasi *cross-section* (Algifari, 2009:88). Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan melihat besaran Durbin-Watson (D-W), setelah itu dilihat nilai kritis uji Durbin-Watson. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan $\alpha = 0,05$



Gambar 4. Daerah Kritis Uji Durbin-Watson

Sumber : Data diolah peneliti dari Harmawan (2011)

Keterangan:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU) berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

b) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Menurut Algifari (2009:55) regresi linier berganda adalah regresi linier dimana variabel terikatnya (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X). Uji statistik regresi linier berganda digunakan untuk menguji signifikansi atau ada tidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya.

Bentuk persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Jumlah penerimaan PPh
- a = Konstanta
- X₁ = Jumlah SSP



X_2 = Jumlah SPT

X_3 = Jumlah SKPKB dan SKPKBT

b_1, b_2, b_3 = Koefisien garis regresi

e = Faktor kesalahan

a) Pengujian Hipotesis

1. Uji R^2 (Koefisien Determinant)

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengatuhui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel (Algifari, 2009:45). Uji R^2 dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel jumlah SSP (X_1), jumlah SPT (X_2) dan jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) terhadap variabel penerimaan PPh (Y). Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 atau mendekati 1, maka semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai R^2 semakin mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji simultan (Uji-F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 2009:72). Adapun langkah-langkah untuk mengukur uji-F adalah sebagai berikut:



a) Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b) Mengambil keputusan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan tingkat signifikan/probabilitas, jika tingkat signifikan/probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

c) Kesimpulan

Dengan probabilitas hitung dengan *level of significance* selanjutnya ditarik kesimpulan.

3. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat

(Algifari, 2009:74). Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji-t adalah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.



b) Mengambil keputusan dengan langkah sebagai berikut:

Berdasarkan tingkat signifikan/probabilitas, jika $\text{sig.t} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

c) Kesimpulan

Dengan probabilitas hitung dengan *level of significance* selanjutnya ditarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

KPP Madya Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan didirikan dalam rangka penyelenggaraan fungsi administrasi perpajakan untuk turut mewujudkan kemandirian pembiayaan negara. Berdiri sejak tahun 2007 dan dengan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 ditetapkanlah saat mulai operasi dari KPP Madya Malang yaitu mulai tanggal 9 April 2007. Dibangun di atas lahan seluas 3000 m², KPP Madya Malang berlokasi di kompleks araya *bussiness center kavling* 1, jalan panji suroso, Kota Malang dengan nomor telepon (0341) 402021 / 402022.

2. Wilayah Kerja dan Wajib Pajak di KPP Madya Malang

KPP Madya Malang mengadministrasikan WP badan tertentu yang berdomisili di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Wilayah kerja KPP Madya Malang membentang dari bagian tengah, timur dan selatan dari Provinsi Jawa Timur yang mencakup 14 kota/kabupaten. Berikut ini adalah rincian dari 14 kota/kabupaten tersebut, yaitu:

1. Malang (3675km²)
2. Batu (137km)
3. Pasuruan (1474km)
4. Probolinggo (1721km)



5. Jember (3293km)
6. Lumajang (1790km)
7. Situbondo (1670km)
8. Bondowoso (1526km)
9. Banyuwangi (5782km)
10. Blitar (1588km)
11. Kediri (1026km)
12. Tulungagung (1055km)
13. Trenggalek (1261km)
14. Nganjuk (1224km)

3. Visi dan Misi KPP Madya Malang

Visi dari KPP Madya Malang adalah menjadi kantor pelayanan pajak terbaik yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Misi dari KPP Madya Malang adalah dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang *excellent* dan adil dan mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada.

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Madya Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, KPP Madya Malang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak tidak

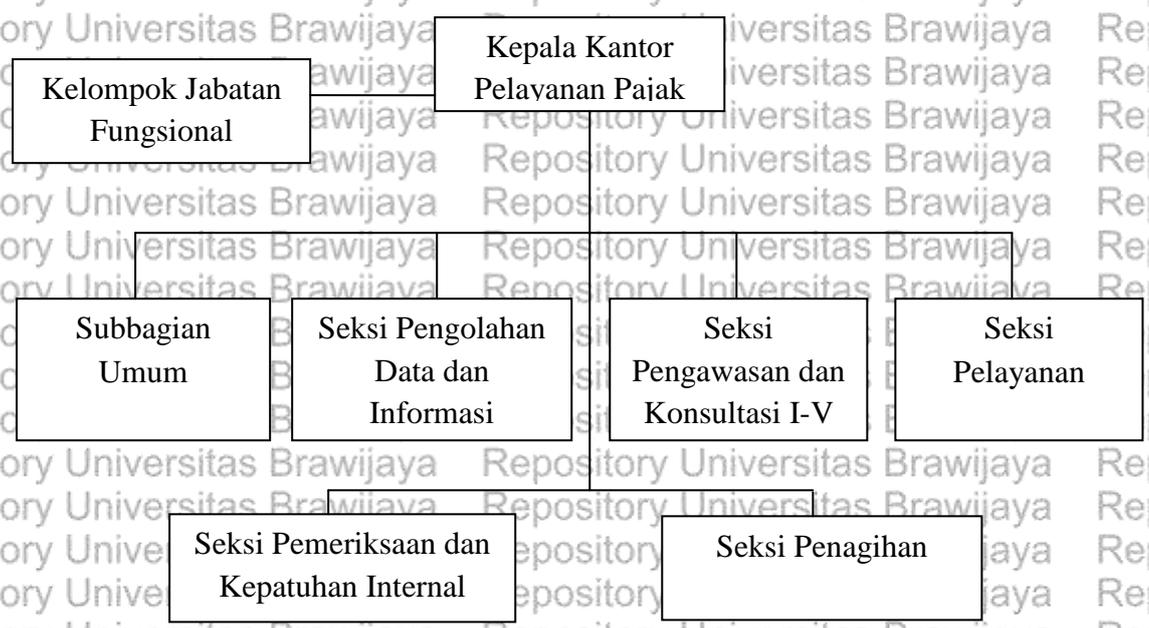
langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Madya Malang dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut menyelenggarakan beberapa fungsi pendukung, yaitu:

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan.
- b) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan perpajakan
- e) Pelaksanaan registrasi WP
- f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP
- i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- j) Pelaksanaan intensifikasi
- k) Pembetulan ketetapan pajak
- l) Pelaksanaan administrasi kantor

KPP Madya Malang dalam melaksanakan berbagai macam fungsi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa seksi, subbagian dan kelompok fungsional pemeriksa dan dapat digambarkan dengan bagan struktur organisasi pada gambar

5 berikut ini:





Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi
Sumber : Data Internal KPP Madya, 2015

5. Uraian Jabatan Struktur Organisasi KPP Madya Malang

Setiap jabatan yang ada pada struktur organisasi di KPP Madya Malang mempunyai tugasnya masing-masing. Berikut ini akan dijabarkan tugas-tugas dari masing-masing jabatan tersebut:

a) Kepala Kantor KPP Madya Malang

Kepala kantor KPP Madya Malang mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan, penyuluhan, pelayanan dan mengawasi WP di bidang perpajakan dalam wilayah kewenangannya berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas untuk melakukan urusan kepegawain, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.



c) Seksi Pengelohan Data dan Informasi

Seksi pengelohan data dan informasi mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kerja.

d) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.



g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, dan IV mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding.

h) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Penyajian Data

Sebelum melakukan analisis data, akan disajikan terlebih dahulu seluruh data yang telah diperoleh peneliti. Seluruh data yang diperoleh dikelompokkan ke tiap-tiap variabel penelitian antara lain jumlah SPT, jumlah SSP, jumlah SKPKB dan SKPKBT serta jumlah penerimaan PPh yang seluruhnya masing-masing berjumlah 36 bulan yaitu terhitung dari bulan Januari tahun 2012 sampai Desember 2014.

Penyajian data ini terdiri atas jumlah variabel tiap bulan, total variabel tiap tahun, nilai tertinggi variabel tiap tahun, dan nilai terendah variabel tiap tahun.

Berikut ini adalah penyajian data dari seluruh variabel yang akan ditampilkan ke dalam tabel tiap variabel.

1. Jumlah SSP

Tabel 5. Jumlah SSP (tahun 2012-2014) dalam satuan (jumlah surat)

Bulan	Tahun		
	2012	2013	2014
Januari	1.368	750	1.263
Februari	1.307	1.205	1.191
Maret	872	1.284	1.268
April	1.309	1.584	1.704
Mei	1.224	1.375	992
Juni	863	1.255	1.408
Juli	1.365	1.389	1.243
Agustus	1.231	1.126	1.330
September	1.316	1.301	1.309
Oktober	1.410	1.357	1.479
November	1.380	1.491	1.853
Desember	1.781	1.766	1.498
Jumlah SSP paling sedikit	863	750	992
Jumlah SSP paling banyak	1.781	1.766	1.853
Total SSP per tahun	15.426	15.883	16.538

Sumber: Lampiran I

Berdasarkan tabel 5 di atas, jumlah SSP yang disetorkan pada tahun 2012 terbanyak adalah pada bulan Desember yaitu sebanyak 1.781 SSP, sementara penyetoran SSP paling sedikit terjadi pada bulan Maret yaitu sejumlah 863 SSP, total SSP tahun 2012 yang disetorkan adalah sebanyak 15.426 SSP. Tahun 2013 SSP paling banyak disetor pada bulan Desember yaitu sebanyak 1.766 SSP, sementara paling sedikit ada pada bulan Januari sebesar 750 SSP, untuk total SSP yang disetorkan adalah sebanyak 15.883 SSP. Tahun 2014 jumlah penyetoran SSP terbanyak adalah pada bulan November yaitu sebanyak 1.853 SSP, sedangkan paling sedikit terjadi pada bulan Mei dengan hanya sebesar 992 SSP dan total SSP terkumpul adalah sebanyak 16.538 SSP.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut yaitu jumlah SSP PPh yang disetorkan pada periode 2012-2014 paling banyak adalah sejumlah 1.853 SSP dan paling sedikit yaitu sejumlah 750 SSP.

2. Jumlah SPT

Tabel 6. Jumlah SPT (tahun 2012-2014) dalam satuan (jumlah surat)

Bulan	Tahun		
	2012	2013	2014
Januari	988	760	703
Februari	958	771	700
Maret	882	683	809
April	940	930	700
Mei	956	898	695
Juni	938	904	698
Juli	926	879	904
Agustus	937	691	695
September	923	773	680
Oktober	921	928	683
November	943	934	667
Desember	907	720	664
Jumlah SPT paling sedikit	882	683	809
Jumlah SPT paling banyak	988	934	664
Total SPT per tahun	11.219	9.871	8.598

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan Tabel 6, jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun 2012 tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan jumlah sebanyak 988 SPT, sedangkan paling sedikit yaitu bulan Maret sebanyak 882 SPT, total SPT terkumpul adalah sebanyak 11.219 SPT. Tahun 2013 pelaporan SPT terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 934 SPT, sementara paling sedikit terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 683 SPT, total SPT yang terkumpul adalah sebanyak 9.871 SPT. Tahun 2014 SPT yang dilaporkan terbanyak terjadi pada bulan Maret

dengan jumlah 809 SPT, sedangkan paling sedikit yaitu pada bulan Desember dengan jumlah 664 SPT, total SPT terkumpul adalah 8.598 SPT.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu pelaporan SPT periode 2012 sampai dengan 2014 paling banyak adalah sejumlah 988 SPT dan paling sedikit yaitu sejumlah 664 SPT.

3. Jumlah SKPKB dan SKPKBT

Tabel 7. Jumlah SKPKB dan SKPKBT (tahun 2012-2014) dalam satuan (jumlah surat)

Bulan	Tahun		
	2012	2013	2014
Januari	3	34	17
Februari	11	9	4
Maret	1	6	22
April	0	59	5
Mei	2	15	4
Juni	5	23	11
Juli	1	56	30
Agustus	29	33	6
September	4	6	13
Oktober	0	6	19
November	35	35	13
Desember	17	75	11
Jumlah SKPKB dan SKPKBT paling sedikit	0	6	4
Jumlah SKPKB dan SKPKBT paling banyak	35	75	30
Total SKPKB dan SKPKBT per tahun	108	357	155

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel 7, pada tahun 2012 jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan paling banyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 35 surat sedangkan paling sedikit terjadi pada bulan April dan Oktober dengan tidak adanya SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan, total SKPKB dan SKPKBT

diterbitkan adalah sebanyak 108 surat. Tahun 2013 SKPKB dan SKPKBT paling banyak diterbitkan yaitu pada bulan Desember dengan jumlah 75 surat, sementara paling sedikit terjadi pada bulan Maret, September, dan Oktober masing-masing dengan jumlah 6 surat, total SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan adalah sebanyak 357 surat. Tahun 2014 penerbitan SKPKB dan SKPKBT tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan jumlah 30 surat, sementara terendah terjadi pada bulan Februari dan Mei dengan jumlah masing-masing 4 surat, total SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan adalah sebanyak 155 surat.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan periode 2012 sampai 2014 paling banyak yaitu sejumlah 75 surat, sementara paling sedikit yaitu dengan jumlah 0 atau dengan kata lain tidak ada SKPKB dan SKPKBT diterbitkan.

4. Jumlah Penerimaan PPh

Tabel 8. Jumlah Penerimaan PPh tahun 2012 sampai 2014 (dalam Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2012	2013	2014
Januari	154.574.293.766	24.882.263.438	149.628.111.190
Februari	154.140.159.943	124.915.203.098	127.595.937.752
Maret	149.039.941.808	125.146.147.288	127.509.400.731
April	154.494.627.957	130.446.793.841	122.896.143.678
Mei	148.054.794.494	129.706.982.976	19.911.362.892
Juni	149.728.220.021	131.968.313.024	123.606.263.470
Juli	127.028.447.869	150.328.929.017	153.104.929.571
Agustus	128.479.095.687	23.972.791.195	154.773.180.324
September	127.137.660.864	149.884.915.055	152.954.551.692
Oktober	127.327.168.253	148.32.899.7592	153.359.321.802
November	127.147.350.814	148.449.254.470	153.720.957.156
Desember	125.145.092.437	148.177.194.663	124.226.289.101
Minimal	125.145.092.437	23.972.791.195	19.911.362.892
Maksimal	150.328.929.017	150.328.929.017	154.773.180.324
Rata-rata	139.358.071.159	119.683.982.138	130.273.870.780

Sumber : Lampiran 1



Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh terbanyak pada tahun 2012 adalah pada bulan Januari yaitu sebesar Rp 154.574.293.766 sementara penerimaan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 125.145.092.437, untuk rata-rata penerimaan PPh adalah sebesar Rp 139.358.071.159. Tahun 2013 penerimaan PPh terbanyak terjadi pada bulan Juli dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 150.328.929.017 sementara penerimaan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan penerimaan hanya Rp 23.972.791.195, untuk rata-rata penerimaan PPh sebesar Rp 119.683.982.138. Tahun 2014 penerimaan PPh paling banyak terjadi di pada bulan September yaitu dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 154.773.180.324 sedangkan penerimaan paling sedikit terjadi pada bulan Mei dengan jumlah hanya Rp 19.911.362.892, untuk rata-rata penerimaan PPh adalah sebesar Rp 130.273.870.780.

Kesimpulan yang didapat dari penjelasan tersebut yaitu penerimaan PPh periode 2012 sampai 2014 tertinggi yaitu sebesar Rp 154. 574.293.766 sedangkan penerimaan terendah yaitu sebesar Rp 19.911.362.892.

C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan penggambaran suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif dari penelitian ini:



Tabel 9. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
X1	36	750.00	1853.00	1329.0833
X2	36	664.00	988.00	824.6667
X3	36	.00	75.00	17.2222
Y	36	19911362892.00	154773180324.00	129771974692.4722
Valid N (listwise)	36			

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa dalam periode Januari 2012 sampai Desember 2014 jumlah SSP paling banyak disetorkan yaitu sebanyak 1853 SSP, sedangkan jumlah paling sedikit SSP yaitu sebanyak 750 SSP, untuk rata-ratanya tiap bulan terkumpul sebanyak 1329 SSP.

Jumlah SPT paling banyak disampaikan yaitu sebanyak 988 SPT, sedangkan paling sedikit SPT disampaikan yaitu sebanyak 664 SPT, untuk rata-ratanya tiap bulan terkumpul sebanyak 824 SPT.

Jumlah SKPKB dan SKPKBT paling banyak diterbitkan yaitu sebanyak 75 SKPKB dan SKPKBT, sementara jumlah paling sedikit yaitu tidak ada SKPKB dan SKPKBT yang terbit, untuk rata-ratanya tiap bulan diterbitkan sebanyak 17 SKPKB dan SKPKBT.

Jumlah penerimaan PPh tertinggi yaitu Rp 154.773.180.324 sementara jumlah terendahnya yaitu sebesar Rp 19.911.362.892, untuk rata-ratanya yaitu sebesar Rp 129.771.974.692,47.



D. Statistik Inferensial

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi dengan menggunakan software SPSS versi 17.00.

a) Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan melihat Kolmogorov-Smirnov *test*, dengan dasar pengambilan keputusan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. Berikut ini adalah hasil Kolmogorov-Sminor *test*:

Tabel 10. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000194
	Std. Deviation	2.86676555E10
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.082
	Negative	-.151
Kolmogorov-Smirnov Z		.903
Asymp. Sig. (2-tailed)		.388

a. Test distribution is Normal.

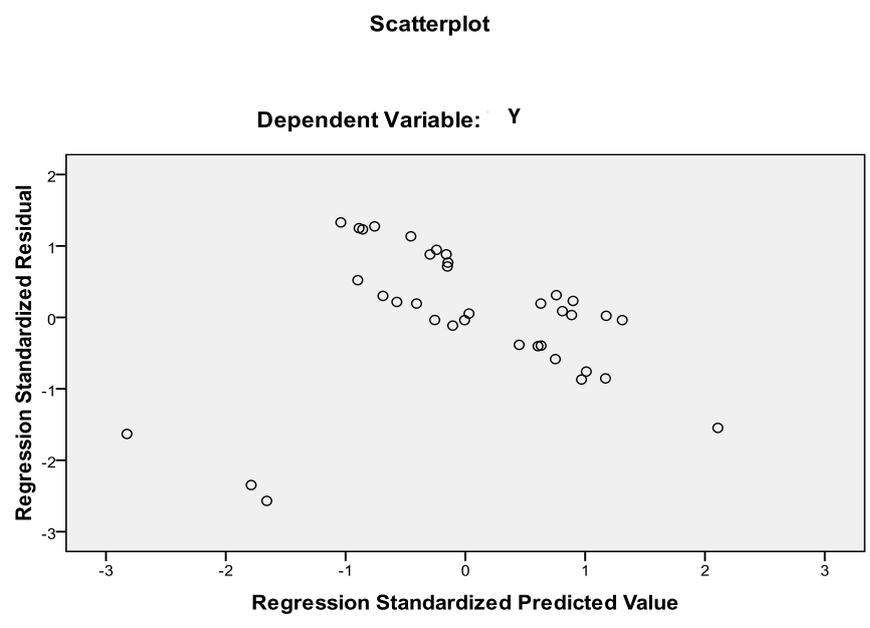
b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,388. Oleh karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas terpenuhi.

b) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatter plot*. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dengan dasar pengambilan keputusan jika tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:



Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Lampiran 3



Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa titik-titik atau poin-poin menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, data penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas.

c) Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF (*Value Inflation Factor*). Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinieritas:

Tabel 11. Uji Multikolinieritas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	.924	1.083
X ₂	.990	1.010
X ₃	.932	1.073

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel bebas lebih dari 0,1 yakni X₁ sebesar 0,924, X₂ sebesar 0,99 dan X₃ sebesar 0,932 dan nilai VIF kurang dari 10 yakni X₁

sebesar 1,083, X_2 sebesar 1,010 dan X_3 sebesar 1,073. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

d) Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). Dasar pengambilan keputusan yaitu jika d terletak antara dU dan (4-dU) berarti tidak ada autokorelasi. Tabel Durbin-Watson untuk $n=36$ dan $k=3$ dengan nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa nilai dU yaitu sebesar 1,295 dan 4-dU sebesar 1,654.

Berikut ini merupakan hasil dari uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson:

Tabel 12. Uji Autokorelasi

Model Summary

Keterangan	Model	Durbin-Watson
Nilai	1	1.531

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 1,531 yang terletak di antara 1,295 (dU) dan 1,654 (4-dU) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga lolos uji autokorelasi.

Berdasarkan hasil dari keempat uji asumsi klasik yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa model regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini sudah layak atau tepat.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu, jumlah SSP (X_1), jumlah SPT (X_2), jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) terhadap variabel terikat yaitu jumlah penerimaan PPh (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-47222075065.998	49063572344.537	
X ₁	72943996.362	22206042.378	.497
X ₂	105660859.820	44695156.451	.346
X ₃	-411653562.792	293260263.205	-.211

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 13 dapat dibuat persamaan regresi seperti berikut:

$$Y = -47222075065 + 72943996X_1 + 105660859X_2 - 411653562X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai a (konstanta) bernilai -47.222.075.065 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel X_1 (jumlah SSP), variabel X_2 (jumlah SPT), variabel X_3 (jumlah SKPKB dan SKPKBT) maka penerimaan PPh akan bernilai (-) 47.222.075.065, atau berarti penerimaan PPh mengalami defisit sebesar Rp 47.222.075.065 dengan kata lain fiskus (pemerintah) mempunyai

tanggung jawab kekurangan penerimaan dari sektor PPh sebesar Rp 47.222.075.065 atas penerimaan PPh yang bernilai negatif tersebut

- b) Koefisien β_1 sebesar 72.943.996 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu variabel X_1 (jumlah SSP) maka akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh sebesar Rp 72.943.966 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- c) Koefisien β_2 sebesar 105.660.859 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu variabel X_2 (jumlah SPT) maka akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh sebesar Rp 105.660.859 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- d) Koefisien β_3 sebesar -411.653.562 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu variabel X_3 (jumlah SKPKB dan SKPKBT) maka akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh sebesar Rp 411.653.562 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi persamaan regresi linier tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah SSP dan jumlah SPT memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPh, sementara jumlah SKPKB dan SKPKBT memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan PPh.

3. Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel jumlah SSP (X_1), jumlah SPT (X_2) dan jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) terhadap variabel penerimaan PPh (Y). Nilai R^2 mempunyai interval

antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 atau mendekati 1, maka semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini merupakan hasil dari uji R^2 :

Tabel 14. Hasil Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569 ^a	.323	.260	2.99814E10

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai *adjusted* R^2 adalah sebesar 0,26 atau 26%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah SSP, jumlah SPT dan jumlah SKPKB dan SKPKBT memberikan pengaruh terhadap variabel penerimaan PPh sebesar 26%, sedangkan sisanya sebesar 74% penerimaan PPh dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

b) Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dari uji-F dalam penelitian ini yaitu :

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai sig.F, jika nilai sig.F < α (0,05) maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Berikut ini adalah hasil dari uji-F:

Tabel 15. Hasil Uji-F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.374E22	3	4.580E21	5.096	.005 ^a
Residual	2.876E22	32	8.989E20		
Total	4.251E22	35			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwa nilai sig.F adalah sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa nilai.F lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel jumlah SSP (X_1), jumlah SPT (X_2), dan variabel jumlah SKPKB dan SKPKBT (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan terhadap penerimaan PPh.

c) Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji-t pada penelitian ini yaitu:

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai sig.t, jika nilai sig.t < α (0,05) maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Berikut ini adalah hasil dari uji-t.

Tabel 16. Hasil Uji-t

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1 (Constant)	-.962	.343
X ₁	3.285	.002
X ₂	2.364	.024
X ₃	-1.404	.170

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 16 dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai sig.t dari variabel X₁ (jumlah SSP) menunjukkan nilai sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan demikian H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X₁ (jumlah SSP) mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara parsial terhadap penerimaan PPh.
2. Nilai sig.t dari variabel X₂ (jumlah SPT) menunjukkan nilai sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan demikian H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X₂ (jumlah SPT) mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara parsial terhadap penerimaan PPh.
3. Nilai sig.t dari variabel X₃ (jumlah SKPKB dan SKPKBT) menunjukkan nilai sebesar 0,170 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan demikian H₀ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X₃ (jumlah SKPKB dan

SKPKBT) berpengaruh tidak signifikan (nyata) secara parsial terhadap penerimaan PPh.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel jumlah SSP, jumlah SPT, dan jumlah SKPKB dan SKPKBT mempunyai pengaruh terhadap variabel jumlah penerimaan PPh sebesar 26% sedangkan sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti variabel jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji simultan (uji-F) diketahui bahwa jumlah SSP, jumlah SPT yang merupakan wujud dari *self assessment system* dan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan wujud dari pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan terhadap jumlah penerimaan PPh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2013:6) bahwa sistem pemungutan pajak (*self assessment system*) mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak serta menurut Gunadi (2001:51) yang mengungkapkan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hasil dari uji parsial (uji-t) jumlah SSP terhadap jumlah penerimaan PPh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) dan Sudadyo (2013) yang





menyatakan bahwa jumlah SSP memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap jumlah penerimaan PPh.

Berdasarkan hasil dari uji parsial (uji-t) jumlah SPT terhadap jumlah penerimaan PPh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2010) yang menyatakan bahwa jumlah SPT memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap jumlah penerimaan PPh.

Hasil dari uji parsial (uji-t) dari jumlah SSP maupun jumlah SPT yang merupakan perwujudan dari *self assessment system* menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh seperti yang diungkapkan oleh Tjahjono dan Husain (2005:27) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak dalam hal ini yaitu *self assessment system*.

Berdasarkan hasil dari uji parsial (uji-t) jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak terhadap jumlah penerimaan PPh menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haq, Siraja dan Ashari (2013) dan Rahmawati, Santoso dan Hamidi (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap jumlah penerimaan PPh.



Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh karena penerbitan SKPKB dan SKPKBT tidak diterbitkan kepada seluruh WP yang terdaftar akan tetapi hanya sebagian WP saja, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suandy (2011:131) menyatakan bahwa penerbitan SKP hanya sebatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. Penyebab lainnya dikarenakan WP tidak melunasi kekurangan pajak yang tertera di SKPKB dan SKPKBT karena mengajukan upaya hukum yang dapat berupa keberatan atas penerbitan SKPKB dan SKPKBT seperti mengajukan keberatan, seperti yang diungkapkan oleh Ilyas dan Suhartono (2013:59) yang menyebutkan bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembetulan, keberatan dan pengurangan/pembatalan atas penerbitan ketetapan pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah SSP dan Jumlah SPT yang merupakan perwujudan dari *self assessment system* serta jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan (bersama-sama) terhadap penerimaan PPh.
2. Hasil untuk uji parsial disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Jumlah SSP mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) terhadap penerimaan PPh.
 - b) Jumlah SPT mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) terhadap penerimaan PPh.
 - c) Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak mempunyai pengaruh signifikan (nyata) terhadap penerimaan PPh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Saran untuk KPP Madya Malang

Saran yang dapat diberikan yaitu agar KPP Madya Malang lebih memperluas cakupan pemeriksaan atas SSP dan SPT yang telah

dilaporkan Wajib Pajak (WP) dan menghimbau Wajib Pajak (WP) agar memperhatikan cara menghitung ataupun mengisi SSP dan SPT sehingga diharapkan akan meminimalisir kesalahan baik dalam jumlah penyetoran pajak maupun pada pengisian SSP dan SPT.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu agar lebih memperbanyak variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti variabel jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP), juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan rentang tahun data yang digunakan dalam penelitian, serta menggunakan teknik dan analisis data yang berbeda.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Algifari. 2009. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Asdi Mahasatya.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Diana, Anastasya dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang : BP-Undip.
- Gunadi., et al. 2001. *Perpajakan*. Jakarta : LPFE-UI.
- Halim, Abdul., et al. 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal dan Misbahuddin. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ilyas, Wirawan dan Suhartono, Rudi. 2013. *Perpajakan*. Jakarta :Mitra Wacana Media.
- Kountur, Ronny. 2005. *Statistik Praktis*. Jakarta : PPM.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Misbahuddin dan Hasan, Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nasution. 2007. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Noer, Ahmad. 2004. *Statistik Deskriptif dan Probabilitas*. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta.
- Priantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : Djembatan.
- Rahayu, Sri Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu dan Suhayati. 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

_____. 2011. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Subiyanto, Ibnu. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: YKPN-Yogya

Sumarsono. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tjahjono, Achmad dan Husain, Muhammad. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Jurnal :

Haq, Siraja, dan Ashari. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Makassar: Universitas Hasanuddin

Harmawan, Fahri Reza. 2010. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Malang: Universitas Brawijaya

Laurensia, Chrisyane. 2011. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Malang: Universitas Brawijaya

Pradana, Iput Wiliyan. 2013. Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

Prihastuti, Enis. 2011. Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Banyuwangi. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Rahmawati, Santoso, dan Hamidi. 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Riyanto, Inggar Ajeng. 2014. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang. Malang: Universitas Brawijaya

Sari, Lidya Purnama. 2009. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Barat. Medan: Universitas Sumatera Utara



Sudadyo, Hanung Tri. 2013. Pengaruh Faktor *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Surakarta). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sudirman, Putriana. 2010. Pengaruh Faktor *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung-Karees. Bandung: Universitas Widyatama

Wahyuni, Ning. 2013. Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. Semarang: Universitas Negeri Semarang



Lampiran 1. Jumlah SSP, SPT, SKPKB dan SKPKBT, Penerimaan PPh

No.	Tahun	Bulan	SSP	SPT	SKPKB dan SKPKBT	Penerimaan PPh (Rupiah)
1.	2012	Januari	1.368	988	3	154.574.293.766
2.	2012	Februari	1.307	958	11	154.140.159.943
3.	2012	Maret	872	882	1	149.039.941.808
4.	2012	April	1.309	940	0	154.494.627.957
5.	2012	Mei	1.224	956	2	148.054.794.494
6.	2012	Juni	863	938	5	149.728.220.021
7.	2012	Juli	1.365	926	1	127.028.447.869
8.	2012	Agustus	1.231	937	29	128.479.095.687
9.	2012	September	1.316	923	4	127.137.660.864
10.	2012	Oktober	1.410	921	0	127.327.168.253
11.	2012	November	1.380	943	35	127.147.350.814
12.	2012	Desember	1.781	907	17	125.145.092.437
13.	2013	Januari	750	760	34	24.882.263.438
14.	2013	Februari	1.205	771	9	124.915.203.098
15.	2013	Maret	1.284	683	6	125.146.147.288
16.	2013	April	1.584	930	59	130.446.793.841
17.	2013	Mei	1.375	898	15	129.706.982.976
18.	2013	Juni	1.255	904	23	131.968.313.024
19.	2013	Juli	1.389	879	56	150.328.929.017
20.	2013	Agustus	1.126	691	33	23.972.791.195
21.	2013	September	1.301	773	6	149.884.915.055
22.	2013	Oktober	1.357	928	6	148.32.899.7592
23.	2013	November	1.491	934	35	148.449.254.470
24.	2013	Desember	1.766	720	75	148.177.194.663
25.	2014	Januari	1.263	703	17	149.628.111.190
26.	2014	Februari	1.191	700	4	127.595.937.752
27.	2014	Maret	1.268	809	22	127.509.400.731
28.	2014	April	1.704	700	5	122.896.143.678
29.	2014	Mei	992	695	4	19.911.362.892
30.	2014	Juni	1.408	698	11	123.606.263.470
31.	2014	Juli	1.243	904	30	153.104.929.571
32.	2014	Agustus	1.330	695	6	154.773.180.324
33.	2014	September	1.309	680	13	152.954.551.692
34.	2014	Oktober	1.479	683	19	153.359.321.802
35.	2014	November	1.853	667	13	153.720.957.156
36.	2014	Desember	1.498	664	11	124.226.289.101





Lampiran 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	36	750.00	1853.00	1329.0833	237.47534
X2	36	664.00	988.00	824.6667	113.95438
X3	36	.00	75.00	17.2222	17.90149
Y	36	1991136289	154773180324.	129771974692.47	34848805719.52877
Valid N (listwise)	36	2.00	00	22	



Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

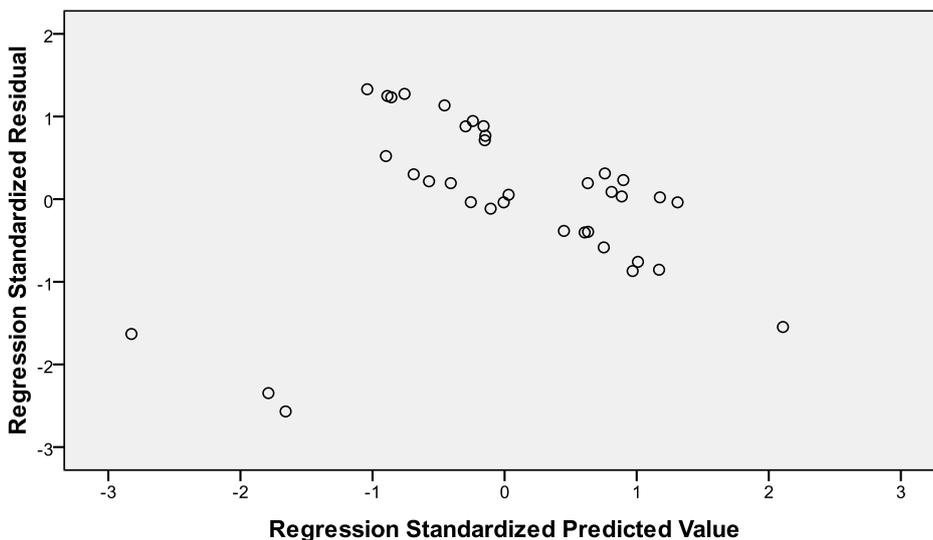
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}		
	Mean	-.0000194
	Std. Deviation	2.86676555E10
Most Extreme Differences		
	Absolute	.151
	Positive	.082
	Negative	-.151
Kolmogorov-Smirnov Z		.903
Asymp. Sig. (2-tailed)		.388

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Scatterplot

Dependent Variable: VAR00004





Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-47222075065.998	49063572344.537		-.962	.343		
	X1	72943996.362	22206042.378	.497	3.285	.002	.924	1.083
	X2	105660859.820	44695156.451	.346	2.364	.024	.990	1.010
	X3	-411653562.792	293260263.205	-.211	-1.404	.170	.932	1.073

a. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.569 ^a	.323	.260	2.99814E10	1.531

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 4. Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-47222075065.998	49063572344.537		-.962	.343		
	X1	72943996.362	22206042.378	.497	3.285	.002	.924	1.083
	X2	105660859.820	44695156.451	.346	2.364	.024	.990	1.010
	X3	-411653562.792	293260263.205	-.211	-1.404	.170	.932	1.073

a. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.569 ^a	.323	.260	2.99814E10	1.531

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.374E22	3	4.580E21	5.096	.005 ^a
	Residual	2.876E22	32	8.989E20		
	Total	4.251E22	35			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 1923 WPJ.12/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Harris, NPM 115030401111012

3 Juni 2015

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jalan MT Haryono Nomor 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 7676/UN10.3/PG/2015 tanggal 27 Mei 2015 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Harris / 115030401111012

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Madya Malang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

Budi Suisanto
197004031995031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0502

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Harris

Nomor Induk Mahasiswa : F150304011F1012

Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 15 Desember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Panjaitan Dalam No.31 Malang

Telepon/HP : 081236679105

Email : harristetap@gmail.com

Pendidikan : 1. SDN 16 Serang
2. SMPN 1 Kota Serang
3. SMAN 1 Kota Serang

Pengalaman Kerja : Magang di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Kertajaya, Surabaya

